

Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Tata Kelola UMKM Berbasis Digitalisasi Di Desa Balongdowo

Oleh:

Naufal Alwan Dhiya Ulhaq

Ilmi Usrotin Chioriyah

Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Februari, 2026



Pendahuluan

- Urgensi UMKM: UMKM memegang peranan vital dalam ekonomi nasional dengan kontribusi 61% terhadap PDB, namun adopsi teknologi di tingkat desa masih sangat terbatas.
- Kondisi Eksisting: Di Desa Balongdowo, dari total 125 unit UMKM, hanya 21 unit (16,8%) yang sudah menggunakan platform digital, sementara sisanya masih bergantung pada metode pemasaran konvensional.
- Masalah Utama: Adanya kesenjangan digital dan kurangnya pendampingan sistematis dari otoritas lokal menyebabkan potensi produk unggulan desa (olahan kupang) sulit bersaing di pasar yang lebih luas.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- Fokus Masalah: Bagaimana peran nyata Pemerintah Desa Balongdowo dalam upaya meningkatkan tata kelola UMKM berbasis digitalisasi jika ditinjau dari fungsinya sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator?
- Tujuan: Menganalisis sejauh mana kebijakan dan tindakan pemerintah desa mampu mempercepat transformasi digital bagi pelaku usaha lokal.

Metode

- Pendekatan Penelitian: Menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena sosial dan kebijakan di lapangan.
- Teknik Pengumpulan Data: Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa (Kepala Desa & Kaur Umum), observasi langsung terhadap aktivitas UMKM, serta dokumentasi arsip desa.
- Analisis Data: Menggunakan teknik analisis data model interaktif yang meliputi kondensasi data, penyajian data secara sistematis, hingga penarikan kesimpulan yang kredibel.

Hasil

- Peran Regulator: Pemerintah desa telah menyusun landasan operasional melalui RPJMDes 2021–2026 dan RKPDes 2024 yang memprioritaskan pemberdayaan ekonomi, meski aturan teknis setingkat Perdes belum tersedia.
- Peran Fasilitator: Tersedianya infrastruktur digital berupa website resmi (balongdowo-sda.id) sebagai etalase produk warga dan pemberian bantuan alat fisik untuk mendukung proses produksi.
- Peran Katalisator: Pemerintah desa bertindak sebagai penghubung dengan pihak akademisi (Poltekkes Surabaya) dalam penyelenggaraan pelatihan literasi digital dan pembuatan platform pemasaran online.

Pembahasan

- Analisis Regulasi: Meskipun kebijakan sudah ada dalam rencana strategis, ketiadaan SOP atau Peraturan Desa yang spesifik membuat program digitalisasi terkesan kurang mengikat secara hukum.
- Analisis Fasilitasi: Pelatihan digital sudah dilakukan, namun tanpa pendampingan pasca-pelatihan yang intensif, banyak pelaku UMKM kembali ke cara lama karena kendala teknis saat praktik mandiri.
- Analisis Katalisasi: Kolaborasi dengan pihak ketiga sudah baik, namun sifatnya masih insidental (berbasis proyek singkat). Diperlukan kemitraan jangka panjang agar transformasi digital menjadi budaya kerja di desa.

Temuan Penting Penelitian

- Efektivitas Peran: Secara umum, pemerintah desa sudah menjalankan fungsinya, namun hasilnya belum optimal karena masih fokus pada penyediaan sarana fisik daripada penguatan kapasitas SDM secara berkelanjutan.
- Hambatan Utama: Kendala terbesar ditemukan pada rendahnya literasi digital perangkat desa sendiri serta belum adanya sistem data UMKM yang terintegrasi secara digital (masih manual).

Manfaat Penelitian

- Bagi Akademisi: Memberikan kontribusi bagi literatur Administrasi Publik mengenai peran pemerintahan level mikro dalam menghadapi era industri 4.0 di wilayah pedesaan pesisir.
- Bagi Pemerintah Desa: Menjadi bahan evaluasi untuk segera merumuskan Perdes mengenai digitalisasi UMKM dan mengaktifkan kembali website desa sebagai pusat informasi ekonomi yang interaktif.

Referensi

- [1] D. Rokhmawati, A. Hariyanto, E. Yuniarto, And S. Hastutik, "Edukasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas Bbi) Dukung Produk Lokal Umkm Bagi Karang Taruna Desa Sukopuro Kecamatan Jabung Kabupaten Malang," Vol. 04, No. 02, Pp. 747–761, 2024.
- [2] D. Q. Nurus Soimah, M Messi, "Strategi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Terhadap Umkm Pada Masa Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19," Pp. 122–127, 2021.
- [3] R. F. Eka Nurzanah, Yenny Marthalena, Riska Agi Sawitri, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Umkm Di Kabupaten Pringsewu," J. Akunt. Aisyah, Vol. 3, No. 1, Pp. 13–24, 2021.
- [4] D. W. Priyanugraha, A. Kadir, M. Zahari, And H. Sabariman, "Implementasi Undang-Undang No . 6 Tahun 2014 Tentang Desa : Desa Umkm Sebagai Media Pengembangan Potensi Desa," Vol. 05, No. 03, Pp. 1–9, 2024.
- [5] R. Tohir, H. Purnamasari, And I. Aditya, "Peran Pemerintah Desa: Pengembangan Umkm Di Desa Wisata Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung," J. Trias Polit., Vol. 7, No. 2, Pp. 293–310, 2023.
- [6] E. B. Orbawati, R. Pajrin, A. Mukti, And B. Rahardjo, "Analisis Swot Dan Framework Implementasi Strategi Pengembangan Umkm," Vol. 8, No. 3, Pp. 229–237, 2023.
- [7] U. Abrar And U. Wiraraja, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Desa Pinggirpapas," Vol. 10, No. 01, Pp. 152–160, 2024.
- [8] C. K. Sidoarjo, "Industry Kupang Kering Di Desa Balongdowo Kecamatan," Vol. 10, No. 3, Pp. 30–42, 2017.
- [9] D. Bender, "Desa - Optimization Of Variable Structure Modelica Models Using Custom Annotations," Acm Int. Conf. Proceeding Ser., Vol. 2, No. 1, Pp. 45–54, 2016, Doi: 10.1145/2904081.2904088.
- [10] B. Setiawan, "Edukasi E-Commerce Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Palembang," Vol. 2, No. 2, Pp. 106–110, 2025.

Referensi

- [11] R. Novianty, S. P. Dewi, And K. Anwar, "Strategi Digitalisasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Umkm Pasca Pandemi," Vol. 4, No. November, Pp. 50–59, 2024.
- [12] U. Di And L. Bajo, Peran Pemerintah Daerah Terhadap Transformasi. 2025.
- [13] B. A. Diana And J. A. Sari, "Dampak Transformasi Digitalisasi Terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat Pedesaan," Vol. 9, No. 2, Pp. 88–96, 2024.
- [14] T. A. Pramesti Et Al., "Pendampingan Legalitas Umkm Nib Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Di Kelurahan Sananwetan , Sananwetan , Kota Blitar," Vol. 1, No. 2, Pp. 385–392, 2022.
- [15] S. N. S. Rasenda, Moch. Rizal, Hari Wiyana, "Digitalisasi Umkm: Strategi Dan Model Bisnis Berbasis Teknologi Untuk Keberlanjutan," Vol. 1, No. 1, Pp. 52–59, 2025.
- [16] P. S. Purba And M. I. Harahap, "Analisis Pengembangan Umkm Go Digital Dalam Penyelamatan Ekonomi Indonesia Menghadapi Resesi Ekonomi Analysis Of The Development Of Go Digital Msmes In Saving The Indonesian Economy Facing The Economic Recession," Vol. 23, No. 2, Pp. 427–443, 2023.
- [17] P. Umkm And D. Desa, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik," Vol. 1, No. 3, Pp. 38–50, 2025.
- [18] L. Z. Firdausya, D. P. Ompusunggu, J. E. Pembangunan, U. P. Raya, And U. P. Raya, "Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Era Digital Abad 21," Vol. 1, No. 3, Pp. 14–18, 2023.
- [19] D. P. Rezkia, "Analisis Penggunaan E-Commerce Bagi Umkm Di Era Digital," Vol. 1, No. 1, 2024.
- [20] A. M. Fahrezi, S. Munir, And D. Yuliani, "Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro Menengah Melalui Platform Digital Di Desa Kujang Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Ciamis," 2025.
- [21] D. A. Rochman And I. U. Choiriyah, "Dampak Tata Kelola Lokal Terhadap Pengembangan Desa Pintar Di Indonesia," J. Pemberdaya. Ekon. Dan Masy., Vol. 1, No. 1, P. 17, 2024, Doi: 10.47134/Jpem.V1i1.321.
- [22] D. A. A. & A. Y. M. Itha Afifah Hafitasari, "Analisis Hubungan E-Commerce Terhadap Umkm Di Indonesia," Vol. 5, No. 2, Pp. 95–105, 2022.
- [23] E. Nurzanah, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Umkm Di Kabupaten Pringsewu".

